



# ANALISIS SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN BELANJA DANA INFRASTRUKTUR DI DESA TULUNG AGUNG PELALAWAN

Widiyanti

STMIK Dharmapala Riau

[widiyanti@lecturer.stmikdharmapalariiau.ac.id](mailto:widiyanti@lecturer.stmikdharmapalariiau.ac.id)

## Article Information

Received: Oktober 2, 2021  
Revised: November 6, 2021  
Online: Desember 25, 2021

## Keywords

Sistem Akuntansi, Anggaran Belanja, Infrastruktur Desa

## Abstrak

Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, "Village Spending includes all expenditures from village accounts which are village obligations within 1 (one) fiscal year which will not be repaid by the village and are used to fund the implementation of village authority. This study uses secondary data sources, data collection methods by means of observation. The object of this research is Tulung Agung Village in Pelalawan Regency.

Tulung Agung Pelalawan Village in implementing the accounting system for the budget for infrastructure funds still uses a manual system, namely inputting data by recording in a ledger without discipline in compiling and attaching a memorandum file. So, it requires a lot of energy and time in the recording process and a big risk in bookkeeping errors. Based on the infrastructure budget accounting system currently running in Tulung Agung Village, it is proposed that the Infrastructure Fund Budget accounting system uses an application, namely Microsoft Access.

## BACKGROUND

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan di Kota dan di desa semakin seimbang. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Dalam proses memajukan desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang

berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

Pembangunan Infrastruktur di Desa Tulung Agung belum mengalami pemerataan jika dibandingkan dengan Desa-Desa yang lainnya, Desa Tulung Agung belum memiliki pembangunan Infrastruktur yang baik diantaranya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung pendidikan yang layak, pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana olahraga, dan Pembangunan sarana Kesehatan yang baik. dikarenakan masih kurang disiplinnya pegawai desa yang menyebabkan kurang optimalnya pembangunan infrastruktur di Desa Tulung Agung.

Sistem akuntansi anggaran belanja dana infrastruktur di Desa Tulung Agung masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan anggaran belanja dana infrastrukturnya pada buku, ini membuat pencatatan menjadi lambat, belum lagi jika terjadi kesalahan pencatatan akan sulit memperbaikinya, pengarsipan nota pembelanjaan juga masih belum cukup efektif karena hanya menumpuknya saja, dengan banyaknya nota pembelanjaan sehingga jika diperlukan informasi tentang pembelanjaan Dana Desa, akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi aparatur Desa untuk mencarinya, dan jika nota tersebut tercampur oleh dokumen-dokumen lainnya, bahkan jika terjadi kehilangan nota tersebut maka Pemerintah Desa sendiri akan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kemana Dana Infrastruktur Desa tersebut kepada Masyarakat setempat, sehingga diperlukan sebuah sistem akuntansi pencatatan dan pengarsipan pembelanjaan yang baik agar pembelanjaan dana infrastruktur desa dapat dimaksimalkan dengan baik, dan mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dana oleh pihak terkait.

Melihat keadaan tersebut diperlukan analisis kembali sistem akuntansi anggaran belanja dana infrastruktur pada Desa Tulung Agung. Di perlukan cara untuk menemukan solusi dari permasalahan apa saja yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Sistem Akuntansi Anggaran Belanja Dana Infrastruktur di Desa Tulung Agung Pelalawan**"

## **RESEACH METHOD**

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian di Tulung Agung Pelalawan.

### **Teknik Analisis Data**

Adapun teknik penelitian yang digunakan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan menelaah berbagai literatur dari perpustakaan dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder.

#### b. Penelitian Lapangan

Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data baik berupa tulisan-tulisan, peraturan-peraturan, maupun dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian dan masalah penelitian.

### **System**

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2016:1) "Sistem (*System*) adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan".

Jogiyanto (2013:1) "Sistem adalah pendekatan pada prosedur dan pendekatan pada komponen-komponen atau elemen-elemen".

Dengan demikian pengertian sistem dapat disimpulkan sebagai suatu prosedur yang saling berhubungan satu sama lain di mana dalam sebuah sistem terdapat suatu masukan, proses dan keluaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Azhar Susanto (2013:23) tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai.

Menurut Tata Sutabri (2012:13) Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan bahwa hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Komponen Sistem (*Component*)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas Sistem (*Boundary*)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem.

d. Penghubung Sistem (*Interface*)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem.

e. Masukan Sistem (*Input*)

Masukan sistem merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*). Sebagai contoh di dalam unit sistem komputer, program adalah *maintenance input* yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Sementara data adalah signal input yang akan diolah menjadi informasi.

f. Keluaran Sistem (*Output*)

Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. Seperti contoh sistem informasi, keluaran yang dihasilkan adalah informasi, dimana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lainnya.

g. Pengolah Sistem (*Process*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen.

### Accounting

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:1) "Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan carayang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil peoses tersebut".

James M. Reeve, et all (2009:4) "Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan".

Soemarso S.R (2009:3) "Akuntansi adalah proses mendefinisikan, mengatur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut".

### Belanja

Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, Paragraf 7 (dalam Erlina dkk,2008) adalah "Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah". Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua. “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang
  - c. Bunga
  - d. Subsidi
  - e. Hibah
  - f. Bantuan sosial.
2. Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
  - a. Belanja modal tanah
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan
  - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya
  - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud)
3. Belanja Lain-lain/belanja Tak Terduga. Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat Universitas Sumatera Utara diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa
  - c. Belanja modal
2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja bunga
  - c. Belanja subsidi
  - d. Belanja hibah
  - e. Belanja bantuan sosial
  - f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pada dasarnya, pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan dan kebutuhan pelayanan publik tersebut. Satu hal yang sangat penting adalah bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan.

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam pendelegasian fungsi belanja, yaitu pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan “pendapatan”. Menurut pendekatan “pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan dirancang sedemikian rupa agar tidak saling timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat lokalitas dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya, pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi dan skala ekonomi, sedangkan menurut pendekatan “pendapatan”, sumber pendapatan publik dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang merupakan hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran iklim politik sangat mempengaruhi dalam pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan. Selanjutnya, meskipun pertimbangan prinsip di atas relevan, namun kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

### Accounting Cycle

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1) dalam buku akuntansi perpajakan menjelaskan siklus akuntansi dimulai dari:

- a. Menganalisis transaksi-transaksi yang dipersiapkan untuk jurnal
- b. Mencatat akun-akun, termasuk debit dan kredit untuk jurnal
- c. Mentransfer debit dan kredit dari jurnal ke buku besar
- d. Meringkas akun buku besar disesuaikan dengan jumlah
- e. Mencatat penyesuaian untuk membawa saldo rekening *up to date*, menjurnal dan posting penyesuaian
- f. Menyesuaikan akun buku besar dan jumlah
- g. Menggunakan neraca saldo setelah disesuaikan untuk mempersiapkan laporan keuangan
- h. Menjurnal dan posting *entry* untuk menutup akun sementara
- i. Tes keakuratan dari prosedur penutupan
- j. Jurnal pembalik dalam periode berikutnya (pilihan)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah menganalisa, mencatat, meringkas dan menyesuaikan laporan keuangan.

### Flowchart

Menurut Krismiaji (2010:71) “Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem.”

Indrajani (2011:22) “Bagan alir (*flowchart*) merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program, biasanya mempermudah penyelesaian masalah yang khususnya perlu di pelajari dan di evaluasi lebih lanjut, digunakan terutama untuk alat bantu desain proses.”



Berdasarkan pendapat dari para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa alur sistem (*flowchart*) merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas berdasarkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam suatu sistem.

### Jenis-jenis Bagan Alir (*Flowchart*)

Menurut Krimiaji (2010:72) terdapat beberapa jenis bagan alir yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Bagan Alir Sistem (*System Flowchart*)

Bagan alir sistem (*system flowchart*) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem.

b. Bagan Alir Dokumen (*Document Flowchart*)

Bagan alir dokumen (*document flowchart*) atau disebut dengan bagan alir formulir (*form flowchart*) atau dokumen bagan alir (*paperwork flowchart*) merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya.

c. Bagan Alir Skematik (*Schematic Flowchart*)

Bagan alir skematik (*schematic flowchart*) merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan.

d. Bagan Alir Program (*Program Flowchart*)

Bagan alir program (*program flowchart*) terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program (*program logic flowchart*) dan bagan alir program komputer terinci (*detailed computer program flowchart*).

e. Bagan Alir Proses (*Process Flowchart*)

Bagan alir proses (*process flowchart*) merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur.

### Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, "Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

### Klasifikasi Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13, adapun klasifikasi belanja desa adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

### Kelompok Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kelompok belanja terdiri atas jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
  1. Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
  2. Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
  3. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- b. Belanja Barang dan Jasa

1. Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Benda pos;
  - c. Bahan/material;
  - d. Pemeliharaan;
  - e. Cetak/penggunaan;
  - f. Sewa kantor desa;
  - g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. Makanan dan minuman rapat;
  - i. Pakaian dinas dan atributnya;
  - j. Perjalanan dinas;
  - k. Upah kerja;
  - l. Honorarium narasumber/ahli;
  - m. Operasional Pemerintah Desa;
  - n. Operasional BPD;
  - o. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
  - p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

c. Belanja Modal

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

**Microsoft Access**

*Microsoft Access* adalah salah satu aplikasi pengolahan database (basis data) yang sudah disediakan secara gratis bersama dengan aplikasi *microsoft* lainnya dalam satu paket *Microsoft Office*. *Microsoft Access* adalah suatu program aplikasi basis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dengan kapasitas yang besar. *Microsoft access* berfungsi sebagai salah satu aplikasi yang menangani proses pembuatan system dan memanipulasi data.

Menurut Andri Kristanto ( 2008 : 79 ), mendefinisikan “Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktifitas dari satu atau lebih organisasi yang berlelasi”.

Menurut Connolly dan Begg (2010 : 66), “Database merupakan himpunan data yang saling berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan data yang diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi bagi pengguna.

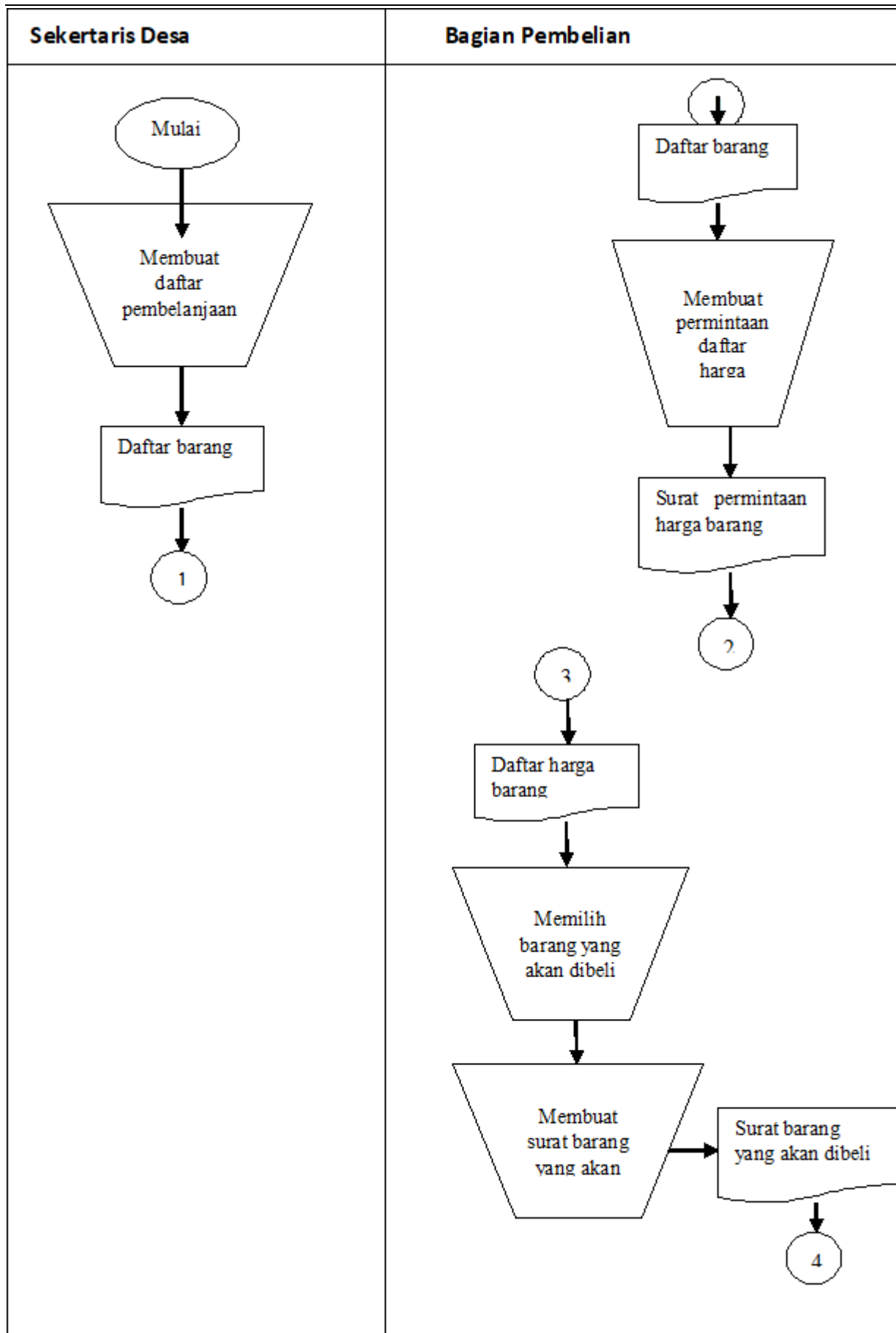
## DISCUSSION

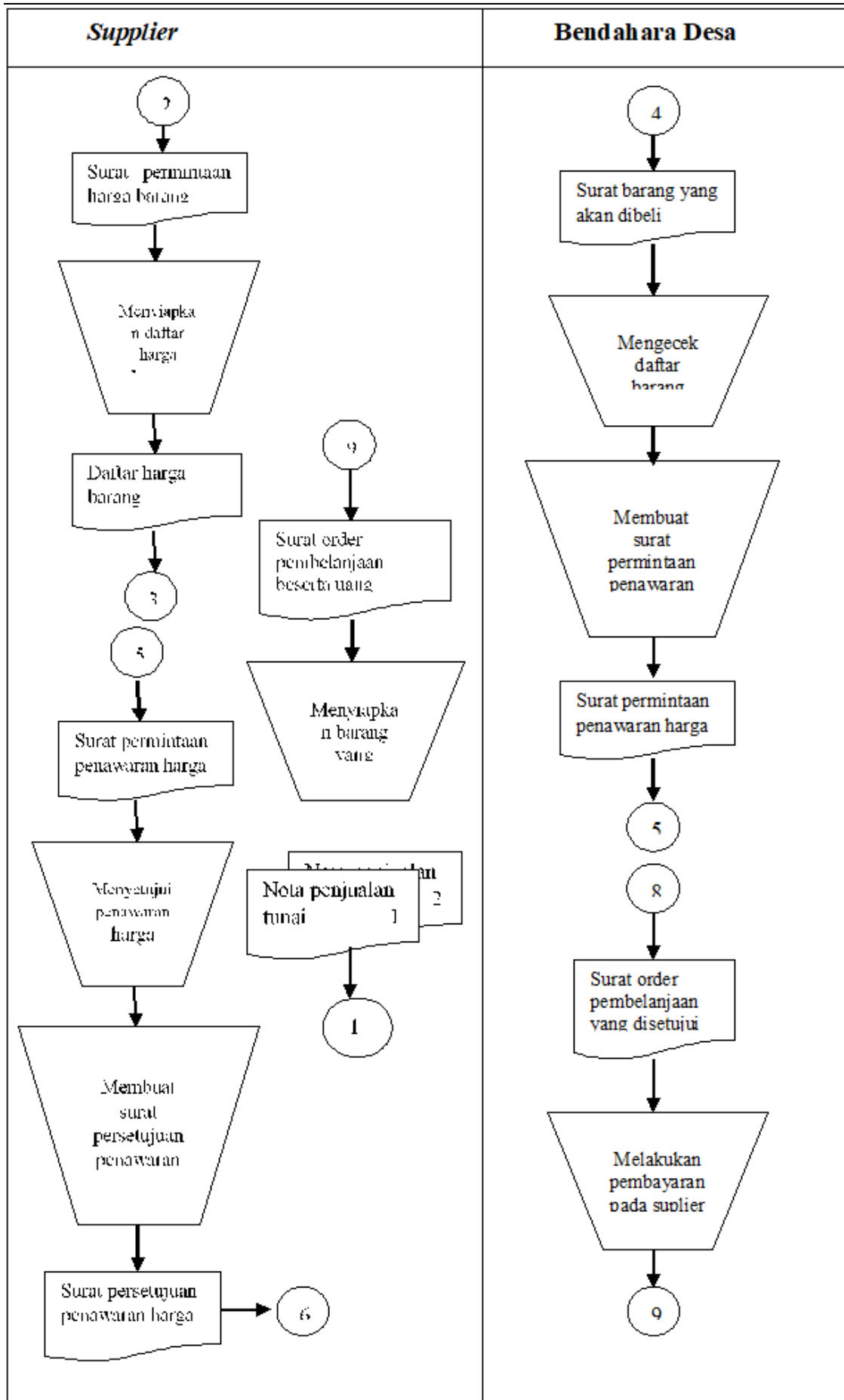
### **Analisis Sistem Akuntansi Anggaran Belanja Dana Desa Yang Sedang Berjalan**

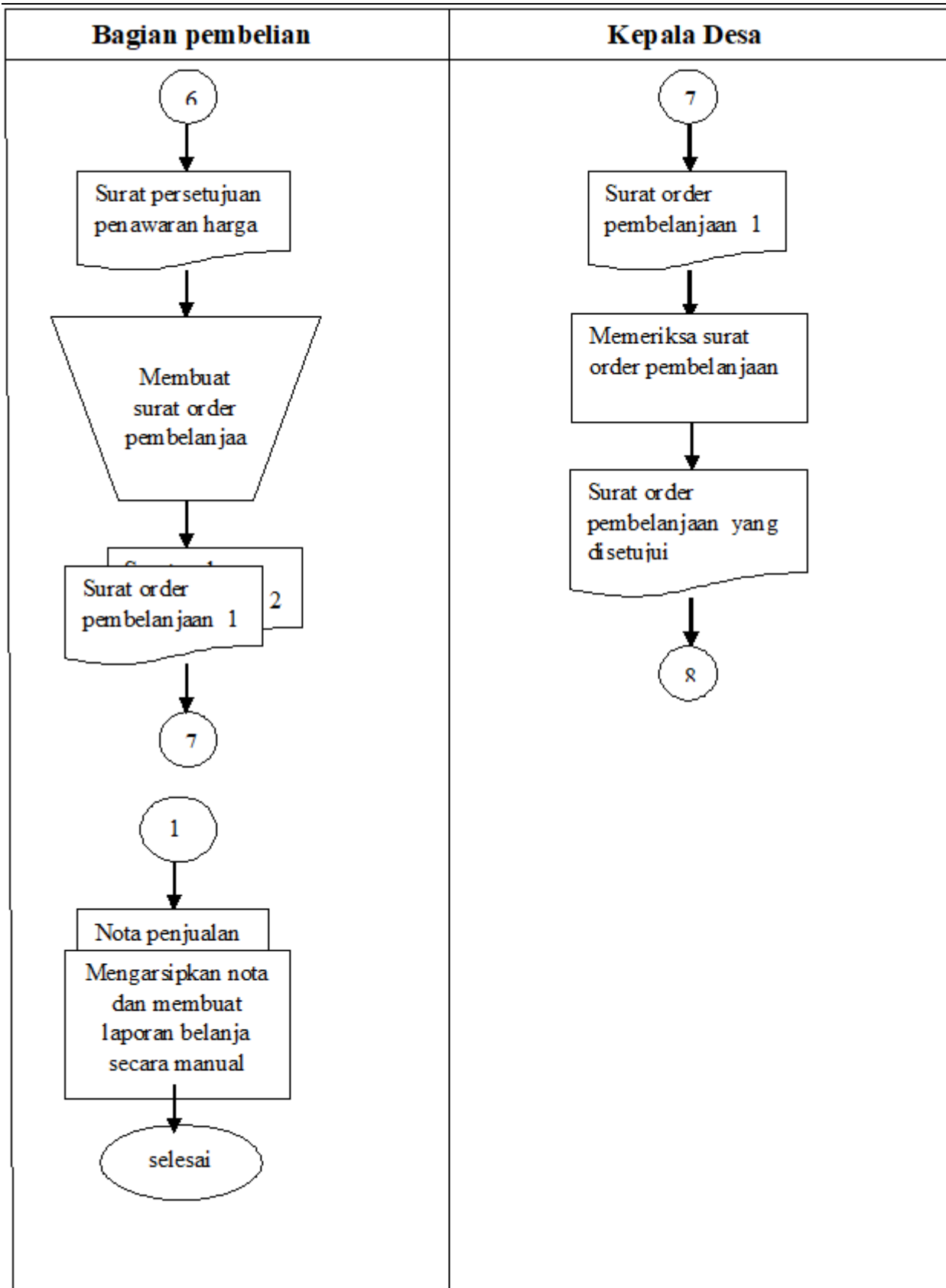
The Peneliti menemukan permasalahan pada Sistem akuntansi anggaran belanja dana Desa Tulung Agung yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan pembelanjaan dana infrastruktur pada buku manual, ini membuat pencatatan menjadi lambat, belum lagi jika terjadi kesalahan pencatatan akan sulit memperbaikinya, dan pengarsipan nota pembelanjaan juga masih belum cukup efektif karena hanya menumpuknya saja, dengan banyaknya nota pembelanjaan sehingga jika diperlukan informasi tentang pembelanjaan Dana Desa, akan memerlukan waktu yang cukup lama bagi aparat Desa untuk mencarinya, dan jika nota tersebut tercampur oleh dokumen-dokumen lainnya, bahkan jika terjadi kehilangan nota tersebut maka Pemerintah Desa sendiri akan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kemana Dana Infrastruktur Desa tersebut, sehingga diperlukan sebuah sistem akuntansi pencatatan dan pengarsipan pembelanjaan yang baik agar pembelanjaan dana infrastruktur desa dapat dimaksimalkan dengan baik, serta mengurangi resiko terjadinya penyelewengan dana oleh pihak terkait.

Berikut *flowchart* sistem akuntansi anggaran belanja dana infrastruktur desa tulung agung yang sedang berjalan:









**Kelebihan dan Kelemahan Sistem yang Berjalan**

Kelebihan dari sistem yang berjalan pada Desa Tulung Agung adalah:

1. Memenuhi jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelanjaan seperti:
  - a. Prosedur pembelanjaan, dalam prosedur ini bendahara desa dipermudah dalam hal pembayaran, karena jelasnya daftar pembelanjaan bahan infrastruktur dan harganya dari supplier.
  - b. Prosedur pencatatan, dalam prosedur ini sekretaris desa menyusun daftar pembelanjaan dengan cara yang mudah karena hanya menyusun nya di buku pembelanjaan.
  - c. Prosedur pengarsipan, bagian pembelian hanya tinggal mengarsipkan nota pembelanjaan pada lemari yang telah disediakan.

Adapun kelemahan dari sistem yang berjalan pada Desa Tulung Agung:

- a. Sekertaris Desa dalam mencatat daftar pembelanjaan masih menggunakan pencatatan manual, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam pencatatan, jika terjadi kesalahan sekretaris desa harus mengulang kembali mencatat daftar pembelanjaan.
- b. Memerlukan waktu yang lama dalam mencari nota pembelanjaan karena tidak tersusun dengan rapi.

**Sistem Akuntansi Anggaran Belanja Dana Desa yang Diusulkan**

Pada sistem yang diusulkan dibuat untuk membantu memecahkan permasalahan sistem pembelanjaan pada Desa Tulung Agung, peneliti mengusulkan untuk menggunakan aplikasi sederhana *Microsoft Access* yang memiliki kemampuan dalam melakukan pencatatan semua transaksi pembelanjaan dan pengelompokkan pencatatan transaksi pembelanjaan.

Dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Access* memberikan solusi kemudahan dalam pencatatan pembelanjaan pada Desa Tulung Agung. Selain itu, menggunakan aplikasi dapat membuat catatan pembelanjaan jadi lebih cepat dan akurat dibanding sistem manual.

## FORM INPUT PRODUK

NO BARANG	A001
NAMA BARANG	PASIR URUG
HARGA	Rp490.000
KETERANGAN	Satuan M3

Gambar Form input produk

## FORM INPUT DISTRIBUTOR

NO DISTRIBUTOR	B001
NAMA DISTRIBUTOR	MARZUKI
NO HP	085254327645

Gambar Form Input Distributor

NO BELANJA	2
TANGGAL	04/05/2017
NO DISTRIBUTOR	B002
NAMA DISTRIBUTOR	TOKO SINAR REZEKI

PEMBELANJAAN subform1

	NAMA BARANG	HARGA	NO BARANG	JUMLAH	TOTAL
*	PASIR	Rp570.000	A002	5	Rp2.850.000

Record: 1 of 1 | No Filter | Search | Jumlah Total: 2850000

Gambar Form Pembelanjaan

NO BELANJA	TANGGAL	NO DISTRIBUTOR	NAMA DISTRIBUTOR	NO BARANG	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH	TOTAL
1	03/05/2017	B001	MARZUKI	A002	PASIR	Rp570.000	7	Rp3.990.000
2	04/05/2017	B002	TOKO SINAR REZEKI	A002	PASIR	Rp570.000	5	Rp2.850.000
4	19/05/2017	B002	TOKO SINAR REZEKI	A003	KERKIL	Rp765.000	2	Rp1.530.000
5	19/05/2017	B002	TOKO SINAR REZEKI	A006	CAT AIR	Rp20.000	2	Rp40.000

Gambar Laporan Pembelian

**Kelebihan dan Kelemahan Sistem yang Diusulkan**

Kelebihan dari sistem yang diusulkan pada Desa Tulung Agung adalah :

- a. Aplikasi *Microsoft Acces* mampu menghitung jumlah pembelian.
- b. Dapat menampilkan data pembelian kapan dibutuhkan.
- c. Dapat menghasilkan informasi laporan pembelian bulanan serta laporan tahunan.
- d. Proses pencatatan pembelian dengan kriteria tertentu dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Kelemahan dari sistem yang diusulkan pada Desa Sapta Jaya adalah :

- a. Aplikasi *Microsoft Access 2007* tidak gratis.
- b. Membutuhkan pegawai yang ahli di bidang komputer.
- c. Hanya dapat memproses maksimal 2 GB file database.
- d. Tidak mendokumentasikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan terhadap kertas kerja kita, tidak ada *logs* yang berguna untuk referensi berikutnya serta buat dokumentasi/arsip.
- e. Hanya bisa memproses sebagian tipe data yang ada di dunia, contohnya *EBCIDIC* (data dari *IBM Mainframe*) tidak dapat diproses oleh *Microsoft Access 2007*.

**CLOSING**

**Simpulan**

Pembangunan infrastruktur desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya sistem akuntansi pembelian dana infrastruktur di Desa Tulung Agung Pelalawan masih menggunakan sistem manual dalam sistem akuntansi anggaran belanja dana infrastrukturnya, ini membuat pencatatan menjadi lambat, belum lagi jika terjadi kesalahan pencatatan akan sulit memperbaikinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sistem akuntansi anggaran belanja dana infrastruktur Desa Tulung Agung maka peneliti menyimpulkan bahwa Desa Tulung Agung dalam pencatatan pembelian dan pengarsipan pembelian masih menggunakan sistem manual sehingga membutuhkan tenaga dan waktu yang cukup lama dalam proses pencatatan pembelian.

Berdasarkan sistem akuntansi pembelian yang sedang berjalan, maka diusulkan sistem akuntansi pembelian yang terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam transaksi pembelian, laporan pembelian, laporan keuangan dan informasi yang dibutuhkan dilakukan secara efektif dan efisien.



**Saran**

1. Diharapkan Kepala Desa mau menerapkan aplikasi komputer dalam pencatatan pembelanjaan sehingga memudahkan dalam melakukan pencatatan pembelanjaan. Adapun aplikasi yang diusulkan adalah *Microsoft Acces*.
2. Memperbaiki sistem pengarsipan nota pembelanjaan dari supplier agar tidak terjadi kehilangan nota pembelanjaan.
3. Diharapkan Kepala Desa harus lebih mengawasi pembelanjaan Desa, agar nantinya tidak terjadi penyelewengan keuangan desa.
4. Diharapkan Bendahara Desa lebih selektif untuk mengeluarkan dana pembelanjaan, agar dapat tercapainya target infrastruktur desa kedepannya.

**REFERENCES**

- Azhar Sutanto, 2013, *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung. Lingga Jaya
- Andi Kristanto. 2008. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Gaya Media. Yogyakarta
- Connolly, T., Begg., C. 2010. *Data Base System : A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 5<sup>th</sup> Edition*. America. Person Education
- James M. Reeve, et. All (2019). *Pengantar Akuntansi: Adaptasi Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat
- Jogiyanto. HM (2009). *Analisis dan Desain*. Yogyakarta. Andi Offset
- Krismiadi (2010). *Sistem Informasi Akuntansi Edisi ke Tiga*. Yogyakarta. Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN
- Sofyan Syafri Harahap. 2011. *Analisis Kritis atas laporan Keuangan*. Edisi ke lima. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soemarso. S.R (2010). *Akuntansi. Suatu Pengantar. Cetakan ke empat*. Jakarta. Salemba Empat Konsumen. Yogyakarta. BPFE